

Pengaruh Pengawasan Internal, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Rencana Kerja dan Anggaran Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo

Dewi Prisantya Kiay¹, Basri Modding², Ayu Anastasya Rachman³

¹⁻³ Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Info Artikel

Article history:

Received Jul, 2026

Revised Jul, 2026

Accepted Jul, 2026

Kata Kunci:

Pengawasan Internal, Akuntabilitas, Kualitas Rencana Kerja dan Anggaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Gorontalo

Keywords:

Internal Oversight, Accountability, and Quality of Work Plans and Budgets, Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, Gorontalo

ABSTRAK

Penelitian ini diarahkan untuk menguji secara empiris pengaruh pengawasan internal dan akuntabilitas terhadap kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Kajian ini berangkat dari kebutuhan memperkuat fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban agar perencanaan serta penganggaran tersusun secara tepat, terukur, selaras dengan dokumen perencanaan strategis, dan mendukung pencapaian kinerja. Pendekatan yang digunakan ialah kuantitatif dengan desain eksplanatori. Dari 84 pegawai dalam populasi, diperoleh 69 responden sebagai sampel melalui rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Data primer dihimpun melalui kuesioner berskala Likert lima tingkat, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen RKA, laporan kinerja, laporan keuangan, regulasi pengelolaan keuangan negara, serta laporan hasil pemeriksaan. Pengawasan internal dioperasionalkan berdasarkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sementara akuntabilitas diarahkan pada pertanggungjawaban aparatur dalam tahapan perencanaan dan penganggaran. Kualitas RKA dinilai melalui ketepatan perencanaan, keselarasan dengan dokumen strategis, kejelasan tujuan dan indikator kinerja, ketepatan distribusi anggaran, serta keterukuran output dan outcome. Pengolahan data dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS melalui uji t, uji F, dan koefisien determinasi pada taraf signifikansi 5%. Analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel independen maupun pengaruh keduanya secara bersama-sama terhadap kualitas RKA berdasarkan data empiris. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam memperkuat pengawasan internal dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu perencanaan dan penganggaran sektor publik.

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the influence of internal oversight and accountability on the quality of the Work Plan and Budget (RKA) at the Gorontalo Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. The study is motivated by the need to strengthen oversight and accountability functions to ensure that planning and budgeting are precise, measurable, aligned with strategic planning documents, and supportive of performance achievement. A quantitative approach with an explanatory design was employed. From a population of 84 employees, a sample of 69 respondents was selected using the Slovin formula with a 5% margin of error. Primary data were collected via a five-point Likert scale questionnaire, while

secondary data were derived from RKA documents, performance reports, financial reports, state financial management regulations, and audit reports. Internal oversight was operationalized based on the elements of the Government Internal Control System, whereas accountability focused on the responsibility of officials during the planning and budgeting stages. RKA quality was assessed based on planning accuracy, alignment with strategic documents, clarity of objectives and performance indicators, accuracy of budget distribution, and the measurability of outputs and outcomes. Data analysis involved multiple linear regression using IBM SPSS—specifically t-tests, F-tests, and the coefficient of determination—at a 5% significance level. This analysis served to identify the influence of each independent variable, as well as their joint influence, on RKA quality based on empirical data. The study's findings are expected to offer practical benefits for strengthening internal oversight and accountability as part of efforts to improve the quality of public sector planning and budgeting.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Dewi Prisantya Kiay

Institution: Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Email: dewiprisantya19@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran publik menempati posisi penting dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perkembangan tuntutan tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan memastikan setiap sumber daya publik dialokasikan berdasarkan kebutuhan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta dapat dipertanggungjawabkan hasil penggunaannya. Oleh karena itu, mutu perencanaan anggaran menjadi krusial, sebab kekeliruan sejak tahap awal dapat berujung pada alokasi yang tidak tepat, pelaksanaan yang tidak efisien, dan kesulitan dalam mempertanggungjawabkan capaian kinerja. Berbagai hasil penelitian memperlihatkan adanya keterkaitan antara pengendalian internal, perencanaan anggaran, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Rahmawati et al. menemukan bahwa perencanaan anggaran bersama pengendalian internal memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah, sedangkan Lemana et al. menunjukkan adanya pengaruh signifikan akuntabilitas publik terhadap penyerapan anggaran pemerintah [1], [2]. Temuan tersebut menegaskan bahwa kualitas tata kelola anggaran tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah anggaran yang berhasil direalisasikan, melainkan juga oleh mutu sistem pengendalian dan mekanisme pertanggungjawaban yang menopang perencanaan serta penganggaran.

Di Indonesia, kebutuhan akan perencanaan dan penganggaran yang bermutu semakin penting karena Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berfungsi menerjemahkan prioritas pembangunan dan sasaran organisasi ke dalam penggunaan sumber daya tahunan. RKA yang baik perlu memperlihatkan keterhubungan yang jelas antara dokumen perencanaan, tujuan dan sasaran organisasi, indikator kinerja, kebutuhan aktual, serta besaran

alokasi anggaran. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berkaitan dengan kualitas tata kelola dan informasi keuangan pemerintah. Susilo et al., melalui kajian terhadap 288 aparat pengawasan internal dan 241 pejabat pengelola keuangan pemerintah daerah di Indonesia, membuktikan bahwa efektivitas pengendalian internal dan good government governance berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi pemerintah [3]. Putri selanjutnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan survei terhadap 350 pegawai pada instansi pemerintah pada organisasi perangkat wilayah [4]. Atas dasar itu, pengawasan internal secara teoritis maupun empiris dapat dipahami sebagai mekanisme yang mendukung kepatuhan proses perencanaan dan penganggaran, membantu mengenali risiko, mengurangi kemungkinan penyimpangan, dan meningkatkan keandalan informasi sebagai landasan penetapan anggaran.

Kondisi serupa dapat diamati pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Data evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang tercantum dalam proposal penelitian menunjukkan perubahan nilai total, yakni 80,00 pada 2024, turun menjadi 73,09 pada 2025, kemudian meningkat menjadi 76,92 pada 2026; ketiga periode tersebut tetap memperoleh predikat BB. Untuk komponen perencanaan kerja, nilai yang dicatat masing-masing sebesar 24 pada 2024, 21 pada 2025, dan 24,6 pada 2026. Hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024–2025 juga menemukan ketidaksesuaian penganggaran dengan postur anggaran serta adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas. Di samping itu, data pengawasan internal mencatat peningkatan jumlah temuan di lingkungan Kementerian Hukum dari 534 temuan sampai triwulan IV 2025 menjadi 560 temuan pada 2026. Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo masih terdapat administrasi pertanggungjawaban yang belum sepenuhnya akuntabel, realisasi penggunaan anggaran yang belum seluruhnya sesuai peruntukan, serta kondisi yang berpotensi menimbulkan pencatatan akun RKA-K/L lebih saji atau kurang saji [5]. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa tersedianya sistem perencanaan dan penganggaran secara formal belum menjadi jaminan otomatis atas kualitas RKA. Karena itu, efektivitas pengawasan internal dan tingkat akuntabilitas aparatur perlu dibuktikan melalui pengujian empiris.

Kajian sebelumnya telah banyak membahas keterkaitan pengawasan internal dan akuntabilitas dengan beragam hasil pengelolaan keuangan pemerintah. Namun, variabel terikat yang digunakan lebih sering berupa akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, kualitas laporan keuangan, atau penyerapan anggaran. Rahmawati et al. [1], misalnya, menjadikan akuntabilitas keuangan sebagai keluaran dengan penyerapan anggaran sebagai variabel mediasi, sedangkan Lemana et al. [2] memusatkan perhatian pada penyerapan anggaran. Permata, Rahayu, dan Yudi memperoleh hasil bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap anggaran, sementara akuntabilitas secara parsial tidak menunjukkan pengaruh signifikan [6]. Mulyati et al. menemukan pula bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah memengaruhi kualitas laporan keuangan yang kemudian berkaitan dengan akuntabilitas keuangan [7]. Pada sisi lain, Tauda et al. dalam penelitian pemerintah daerah membuktikan bahwa penganggaran berbasis kinerja dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah [8]. Variasi fokus tersebut memperlihatkan research gap berupa masih terbatasnya penelitian kuantitatif yang secara langsung menempatkan pengawasan internal dan akuntabilitas sebagai faktor penentu kualitas Rencana Kerja dan Anggaran, terutama pada organisasi vertikal kementerian di tingkat wilayah. Penelitian ini berupaya menjawab

kesenjangan tersebut dengan menjadikan kualitas RKA sebagai variabel dependen yang dinilai melalui ketepatan perencanaan, kesesuaian dengan dokumen strategis, kejelasan tujuan dan indikator kinerja, ketepatan alokasi anggaran, serta keterukuran output dan outcome sebagaimana batasan penelitian dalam proposal [9].

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengawasan internal dan akuntabilitas terhadap kualitas Rencana Kerja dan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, baik secara individual maupun bersama-sama. Secara teoretis, hubungan antarvariabel dapat dipahami melalui perspektif manajemen sektor publik dan tata kelola, di mana pengendalian berfungsi menjaga agar aktivitas organisasi tetap mengarah pada tujuan, sedangkan akuntabilitas memastikan kewenangan dan sumber daya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar itu, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) apakah pengawasan internal berpengaruh terhadap kualitas RKA; (2) apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas RKA; dan (3) apakah pengawasan internal dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas RKA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo? Sejalan dengan kerangka tersebut, hipotesis yang diajukan ialah H1: pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas RKA; H2: akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas RKA; dan H3: pengawasan internal dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas RKA. Pengujian terhadap hubungan tersebut diharapkan menambah bukti mengenai determinan kualitas perencanaan dan penganggaran sektor publik sekaligus menjadi pijakan bagi penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penyusunan RKA di lingkungan Kementerian Hukum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Landasan Teoretis dan Kerangka Konseptual*

Pengelolaan sektor publik dan kualitas perencanaan anggaran. Pengelolaan keuangan sektor publik memerlukan perencanaan dan penganggaran yang dapat menyelaraskan sumber daya yang tersedia dengan tujuan, sasaran, serta hasil yang ditargetkan organisasi. Dalam pemerintahan, kualitas anggaran tidak cukup dinilai dari jumlah dana atau tingkat realisasinya, tetapi juga dari ketepatan perencanaan, keterkaitan anggaran dengan kinerja, transparansi, akuntabilitas, dan kedisiplinan dalam pemanfaatan sumber daya publik. Rahmawati et al. menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan anggaran dan pengendalian internal dengan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, sedangkan kajian mengenai performance-based budgeting menegaskan peran penganggaran berbasis kinerja dalam mengaitkan alokasi sumber daya dengan akuntabilitas kinerja pemerintah [1], [2]. Pandangan tersebut sesuai dengan penelitian ini karena Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berfungsi mengoperasionalkan sasaran organisasi melalui program, kegiatan, indikator, target, dan kebutuhan dana. Dengan demikian, kualitas RKA dapat dimaknai sebagai kemampuan dokumen anggaran untuk merepresentasikan kebutuhan organisasi secara akurat, selaras dengan dokumen perencanaan, dapat diukur, dan diarahkan pada pencapaian kinerja.

Pengawasan internal. Dalam penelitian ini, pengawasan internal merujuk pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yakni mekanisme pengendalian yang

dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pimpinan bersama seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan kerangka penelitian pada proposal, dimensinya meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Secara konseptual, mekanisme tersebut diarahkan untuk memastikan kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan, prosedur, ketentuan, dan risiko yang telah dikenali. Bukti penelitian menunjukkan bahwa unsur SPIP berkaitan dengan akuntabilitas keuangan. Utami dan Ganika menguji lima unsur SPIP—lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan—dan menunjukkan arti penting sistem pengendalian pemerintah dalam menjelaskan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah [3]. Putri juga menemukan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah [4]. Dalam penelitian ini, efektivitas pengawasan internal diperkirakan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencegah kekeliruan perencanaan, mengenali risiko penganggaran, mematuhi ketentuan, dan mempertahankan keselarasan antara rencana kerja dan alokasi anggaran. Oleh karena itu, secara teoretis pengawasan internal diprediksi memberikan pengaruh positif terhadap kualitas RKA.

Akuntabilitas. Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban organisasi dan aparatur untuk memberikan pertanggungjawaban atas kewenangan, sumber daya, keputusan, serta hasil yang dicapai kepada pihak yang berhak memperoleh informasi dan pertanggungjawaban. Fokus akuntabilitas dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban kinerja aparatur pada proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, termasuk kemampuan menjelaskan perencanaan program dan penganggaran secara transparan, terukur, serta selaras dengan sasaran organisasi. Hubungan tersebut dapat diterangkan melalui *agency theory*, karena pengelolaan sumber daya publik melibatkan relasi mandat antara pihak pemberi amanah dan pihak yang menerima serta menjalankan amanah. Sebagai pelaksana mandat, aparatur pemerintah dituntut menghasilkan keputusan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada organisasi maupun pemangku kepentingan. Dengan adanya akuntabilitas, setiap program, kegiatan, indikator, target, dan alokasi anggaran dituntut memiliki dasar yang jelas serta dapat dijelaskan secara rasional. Secara empiris, Lemana et al. menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia [5]. Rahmawati et al. juga menemukan hubungan positif antara perencanaan anggaran dan pengendalian internal dengan akuntabilitas keuangan [1]. Oleh sebab itu, peningkatan akuntabilitas aparatur dalam perencanaan dan penganggaran diperkirakan memperkuat dorongan untuk menghasilkan RKA yang transparan, rasional, terukur, dan sejalan dengan sasaran kinerja organisasi.

Kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dalam model penelitian ini, kualitas RKA ditempatkan sebagai variabel dependen sekaligus hasil dari proses perencanaan dan penganggaran. Kualitas tersebut tidak hanya ditentukan oleh akurasi nominal anggaran, tetapi juga oleh mutu substansi perencanaan yang menjadi dasar penyusunannya. Sesuai proposal penelitian, kualitas RKA dibatasi pada ketepatan

perencanaan, keselarasan dengan dokumen perencanaan strategis, kejelasan tujuan dan indikator kinerja, ketepatan alokasi anggaran, serta keterukuran output dan outcome. Batasan ini sejalan dengan kajian kualitas anggaran pemerintah yang menggunakan transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas, serta orientasi kinerja sebagai karakteristik kualitas anggaran [6]. Dengan demikian, RKA yang berkualitas harus memperlihatkan keterkaitan logis antara kebutuhan atau persoalan organisasi, tujuan, kegiatan, indikator kinerja, target, dan sumber daya yang diperlukan. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, mutu RKA penting karena dokumen tersebut menjadi pijakan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sarana untuk melihat keselarasan perencanaan, penganggaran, dan kinerja organisasi.

Hubungan pengawasan internal terhadap kualitas RKA. Keterkaitan pengawasan internal dengan kualitas RKA dapat diterangkan melalui fungsi pengendalian yang menjaga agar setiap tahapan penyusunan perencanaan dan anggaran tetap sesuai prosedur serta arah organisasi. Pengawasan yang berjalan efektif memberi ruang bagi organisasi untuk mengenali risiko sejak awal penyusunan anggaran, menelaah usulan kegiatan, menguji kesesuaian kebutuhan dengan alokasi dana, dan menemukan potensi kesalahan sebelum RKA ditetapkan. Rahmawati et al. membuktikan bahwa internal control berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah [1]. Putri juga memperoleh bukti bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah [4]. Sebaliknya, Lemana et al. menemukan bahwa SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, sedangkan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan [5]. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa konsekuensi pengawasan internal dapat berbeda menurut keluaran yang digunakan. Penyerapan anggaran menggambarkan pelaksanaan anggaran, sementara kualitas RKA lebih merepresentasikan mutu tahap perencanaan. Karena itu, penelitian ini penting untuk menguji apakah pengawasan internal memberikan pengaruh langsung terhadap mutu dokumen perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan pertimbangan teoretis tersebut, hipotesis pertama dirumuskan: H1: Pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Rencana Kerja dan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo.

Hubungan akuntabilitas terhadap kualitas RKA. Secara teoretis, tuntutan akuntabilitas mengarahkan aparaturnya untuk menghasilkan perencanaan dan anggaran yang dapat dijelaskan serta dipertanggungjawabkan berdasarkan tujuan dan hasil yang ditetapkan. Apabila penyusunan RKA berlangsung dalam lingkungan dengan tuntutan pertanggungjawaban yang kuat, aparaturnya akan lebih terdorong memastikan setiap program dan kegiatan didukung kebutuhan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, alokasi yang rasional, dan keterkaitan yang konsisten dengan sasaran organisasi. Lemana et al. menemukan bahwa public accountability berpengaruh signifikan terhadap budget absorption pada kementerian dan lembaga di Indonesia [5]. Rahmawati et al. juga memperoleh bukti adanya pengaruh positif akuntabilitas yang berkaitan dengan perencanaan anggaran dan pengendalian internal [1]. Namun, Permata et al. menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap daya

serap anggaran, sementara akuntabilitas tidak memberikan pengaruh parsial yang signifikan [7]. Ketidakkonsistenan tersebut mengisyaratkan bahwa pengaruh akuntabilitas dapat berbeda pada berbagai dimensi pengelolaan anggaran. Kesenjangan ini penting dikaji karena penelitian sebelumnya lebih banyak menghubungkan akuntabilitas dengan penyerapan anggaran atau kinerja, bukan dengan kualitas RKA sebagai produk perencanaan. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis kedua dirumuskan: H2: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Rencana Kerja dan Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo.

2.2 *Penelitian Terdahulu*

Sejumlah penelitian terdahulu menjadi landasan empiris bagi model penelitian ini. Pertama, Rahmawati et al. [1] membuktikan bahwa perencanaan anggaran dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan; namun, akuntabilitas ditempatkan sebagai keluaran dan penyerapan anggaran digunakan sebagai mekanisme mediasi. Kedua, Lemana et al. [5] menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran, sedangkan SPIP tidak menunjukkan pengaruh signifikan; fokus kajiannya adalah penyerapan anggaran pada kementerian dan lembaga, bukan kualitas RKA. Ketiga, Putri [4] menemukan bahwa SPIP dan Penerapan penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, tetapi kualitas RKA tidak digunakan sebagai variabel dependen. Dengan demikian, studi terdahulu lebih banyak menempatkan pengawasan internal dan akuntabilitas dalam kaitannya dengan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, kualitas laporan keuangan, maupun penyerapan anggaran. Penelitian yang secara bersamaan menggunakan pengawasan internal dan akuntabilitas sebagai prediktor kualitas RKA masih relatif terbatas. Kajian yang secara khusus mengambil organisasi vertikal kementerian pada tingkat wilayah juga belum banyak ditemukan. Research gap tersebut menjadi pijakan penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Selain menguji pengaruh setiap variabel secara parsial, penelitian ini menilai pengaruh keduanya secara simultan terhadap kualitas RKA sehingga diharapkan menambah bukti empiris mengenai determinan mutu perencanaan dan penganggaran sektor publik.

2.3 *Kerangka Berpikir dan Model Konseptual*

Berdasarkan hasil kajian teoretis dan temuan penelitian sebelumnya, model penelitian menempatkan pengawasan internal (X1) serta akuntabilitas (X2) sebagai variabel independen yang diperkirakan menentukan kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (Y). Pengawasan internal yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dipandang dapat membentuk proses perencanaan yang lebih tertib, patuh, sekaligus responsif terhadap risiko. Di sisi lain, akuntabilitas mendorong aparatur memberikan pertanggungjawaban atas proses maupun hasil perencanaan secara transparan, terukur, dan sejalan dengan sasaran organisasi. Kedua mekanisme tersebut diperkirakan bekerja secara saling melengkapi untuk menghasilkan RKA yang bermutu, yakni dokumen yang konsisten dengan perencanaan, mempunyai tujuan

serta indikator yang jelas, menetapkan alokasi anggaran secara tepat, dan menghasilkan output serta outcome yang dapat diukur. Oleh karena itu, model konseptual mengasumsikan hubungan pengawasan internal (X1) → kualitas RKA (Y) dan akuntabilitas (X2) → kualitas RKA (Y), serta hubungan simultan pengawasan internal dan akuntabilitas → kualitas RKA. Model ini selanjutnya menjadi landasan pengujian hipotesis kuantitatif melalui analisis pengaruh parsial dan simultan sesuai rumusan penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori (explanatory research). Desain tersebut dipilih untuk menjelaskan pengaruh pengawasan internal dan akuntabilitas sebagai variabel independen terhadap kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai variabel dependen pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pemilihan desain ini sesuai dengan tujuan penelitian yang tidak berhenti pada penggambaran kondisi variabel, tetapi juga menguji hubungan antarvariabel secara empiris melalui hipotesis. Penggunaan pendekatan kuantitatif dan kuesioner juga dijumpai pada penelitian sektor publik sebelumnya dalam menguji keterkaitan sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas keuangan. Utami dan Ganika, misalnya, menerapkan kuesioner dan analisis berbantuan SPSS untuk menguji lima unsur sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Lokasi penelitian dipilih di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo karena organisasi tersebut menjalankan fungsi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja serta memiliki aparatur yang terlibat dalam penyusunan RKA.

Sumber data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner tertutup yang disampaikan kepada aparatur yang terlibat dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran. Instrumen menggunakan skala Likert lima tingkat, yakni 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. Kuesioner tersebut digunakan untuk menangkap persepsi responden mengenai pelaksanaan pengawasan internal, tingkat akuntabilitas aparatur, dan kualitas RKA. Sementara itu, data sekunder dihimpun melalui dokumentasi terhadap dokumen resmi organisasi, yang mencakup dokumen RKA, laporan kinerja, laporan keuangan, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara, dan laporan hasil pemeriksaan. Data dokumenter berfungsi sebagai informasi pendukung untuk memperkuat temuan dari kuesioner. Selain itu, observasi terbatas secara non-partisipatif dimungkinkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai proses perencanaan, koordinasi antarunit, dan pelaksanaan mekanisme pengawasan internal.

Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo yang berada dalam lingkungan organisasi dan memiliki keterkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, maupun pengendalian RKA. Mengacu pada data proposal, jumlah populasi mencapai 84 orang, terdiri atas 75 PNS dan 9 P3K paruh waktu. Dengan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 5%, diperoleh ukuran sampel 69,4 yang kemudian dibulatkan menjadi 69 responden. Responden dipilih dari aparatur yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan terkait proses RKA agar informasi yang diberikan sesuai dengan tujuan penelitian. Unit analisis penelitian adalah individu aparatur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, sedangkan objek yang dianalisis berupa persepsi mengenai pengawasan internal, akuntabilitas, dan kualitas RKA. Penetapan responden yang memahami proses perencanaan dan

penganggaran diperlukan untuk mempertahankan relevansi data, mengingat kualitas respons kuesioner berkaitan erat dengan pengalaman responden terhadap objek yang diteliti.

Penyusunan instrumen penelitian didasarkan pada definisi operasional serta indikator yang digunakan untuk setiap variabel. Pengawasan internal (X1) diukur melalui unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Akuntabilitas (X2) dioperasionalkan melalui pertanggungjawaban aparatur dalam perencanaan dan penganggaran, sedangkan kualitas RKA (Y) dinilai berdasarkan ketepatan perencanaan, keselarasan dengan dokumen perencanaan strategis, kejelasan tujuan dan indikator kinerja, ketepatan alokasi anggaran, serta keterukuran output dan outcome. Sebelum digunakan dalam analisis, instrumen diperiksa melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas bertujuan memastikan setiap butir mampu merepresentasikan konstruk yang diukur, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi internal instrumen. Penggunaan kuesioner dan pengujian kuantitatif untuk mengukur pengendalian internal serta akuntabilitas sektor publik juga diterapkan pada penelitian terdahulu. Utami dan Ganika, misalnya, menggunakan kuesioner kepada 85 responden serta SPSS dalam penelitian SPIP dan akuntabilitas keuangan. Jatmiko, Haya, dan Utami juga menerapkan survei dan kuesioner kepada 121 responden dari 30 organisasi pemerintah daerah untuk menguji peran akuntabilitas keuangan publik dan pengendalian internal.

Pengolahan data dilakukan dengan IBM SPSS melalui statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan karakteristik responden dan pola distribusi data melalui frekuensi, persentase, nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi. Tahap berikutnya mencakup uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik yang terdiri atas normalitas, multikolinearitas, serta heteroskedastisitas sebelum model regresi diuji. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda untuk mengidentifikasi pengaruh pengawasan internal dan akuntabilitas terhadap kualitas RKA dengan persamaan $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$. Uji t digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, sedangkan uji F digunakan untuk menilai pengaruh keduanya secara simultan. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui proporsi variasi kualitas RKA yang dapat dijelaskan oleh pengawasan internal dan akuntabilitas. Taraf signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$; nilai signifikansi $< 0,05$ menjadi dasar penerimaan hipotesis alternatif dan penolakan hipotesis nol, sedangkan nilai signifikansi $\geq 0,05$ menjadi dasar penolakan hipotesis alternatif. Penggunaan regresi linear berganda dan SPSS juga memiliki dukungan empiris dalam penelitian sektor publik, termasuk studi Utami dan Ganika yang memanfaatkan SPSS untuk menguji pengaruh unsur SPIP terhadap akuntabilitas keuangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Penelitian ini menguji pengaruh pengawasan internal dan akuntabilitas terhadap kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pengawasan internal (X1) dioperasionalkan melalui lima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Akuntabilitas (X2) diukur melalui akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta

akuntabilitas kebijakan. Adapun kualitas RKA (Y) diukur menggunakan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Seluruh konstruk penelitian diukur dengan skala Likert lima tingkat.

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pola respons responden pada setiap variabel penelitian. Parameter yang disajikan mencakup nilai minimum dan maksimum, nilai rata-rata, standar deviasi, distribusi frekuensi, serta persentase.

Tabel 1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengawasan Internal (X1)	69	[]	[]	[]	[]
Akuntabilitas (X2)	69	[]	[]	[]	[]
Kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (Y)	69	[]	[]	[]	[]

Merujuk pada Tabel 1, nilai rata-rata pengawasan internal tercatat sebesar [], akuntabilitas sebesar [], dan kualitas RKA sebesar []. Rata-rata tersebut menggambarkan kecenderungan penilaian responden terhadap kondisi masing-masing variabel. Variabel yang memiliki mean tertinggi dapat dipandang sebagai aspek yang relatif lebih baik menurut responden, sedangkan mean terendah menunjukkan bagian yang masih membutuhkan perhatian dan peningkatan. Sementara itu, standar deviasi sebesar [] untuk pengawasan internal, [] untuk akuntabilitas, dan [] untuk kualitas RKA menggambarkan tingkat keragaman respons pada setiap variabel.

4.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum hipotesis diuji, kualitas instrumen terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan bahwa setiap pernyataan benar-benar mengukur konstruk secara tepat dan konsisten. Validitas dinilai menggunakan Corrected Item-Total Correlation, sedangkan reliabilitas ditentukan melalui Cronbach's Alpha. Dalam rancangan penelitian, suatu item dianggap valid apabila korelasi item melampaui nilai r-tabel atau tingkat signifikansinya kurang dari 0,05. Instrumen dinilai reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,70$.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Pengawasan Internal (X1)	[]	$\geq 0,70$	[Reliabel/Tidak]
Akuntabilitas (X2)	[]	$\geq 0,70$	[Reliabel/Tidak]
Kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (Y)	[]	$\geq 0,70$	[Reliabel/Tidak]

Pada Tabel 2 ditampilkan nilai Cronbach's Alpha untuk pengawasan internal sebesar [], akuntabilitas sebesar [], dan kualitas RKA sebesar []. Berdasarkan nilai tersebut, instrumen penelitian [dinyatakan reliabel/tidak seluruhnya reliabel] dan [layak/belum layak] dipergunakan pada tahap analisis berikutnya.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilaksanakan sebelum estimasi regresi linear berganda untuk memastikan model memenuhi ketentuan statistik yang diperlukan. Pengujian mencakup normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Data dianggap berdistribusi normal apabila nilai signifikansi uji normalitas $> 0,05$. Tidak adanya multikolinearitas ditunjukkan oleh tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , sedangkan heteroskedastisitas dinyatakan tidak terjadi apabila nilai signifikansi uji Glejser $> 0,05$.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian	Indikator	Nilai	Kriteria	Keterangan
Normalitas	Sig. Kolmogorov-Smirnov	[]	$> 0,05$	[Normal/Tidak]
Multikolinearitas X1	Tolerance / VIF	[] / []	$> 0,10 / < 10$	[Terpenuhi/Tidak]
Multikolinearitas X2	Tolerance / VIF	[] / []	$> 0,10 / < 10$	[Terpenuhi/Tidak]
Heteroskedastisitas X1	Sig. Glejser	[]	$> 0,05$	[Tidak terjadi/Terjadi]
Heteroskedastisitas X2	Sig. Glejser	[]	$> 0,05$	[Tidak terjadi/Terjadi]

Berdasarkan hasil pengujian, model regresi yang digunakan [telah/belum] memenuhi persyaratan asumsi klasik. Jika seluruh kriteria tersebut terpenuhi, regresi linear berganda dapat diterapkan untuk menganalisis pengaruh pengawasan internal dan akuntabilitas terhadap kualitas RKA.

4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda diterapkan untuk mengestimasi pengaruh pengawasan internal (X1) dan akuntabilitas (X2) terhadap kualitas RKA (Y). Persamaan model penelitian dinyatakan sebagai:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	[]	[]	-	[]	[]
Pengawasan Internal (X1)	[]	[]	[]	[]	[]
Akuntabilitas (X2)	[]	[]	[]	[]	[]

Mengacu pada Tabel 4, persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = [] + []X_1 + []X_2$. Koefisien regresi pengawasan internal sebesar [] berarti bahwa kenaikan satu satuan pada pengawasan internal diperkirakan mengubah kualitas RKA sebesar [] satuan ketika akuntabilitas berada dalam kondisi tetap. Adapun koefisien regresi akuntabilitas sebesar [] menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas satu satuan diperkirakan menghasilkan perubahan kualitas RKA sebesar [] satuan dengan pengawasan internal dianggap konstan.

4.1.5 Uji Hipotesis Parsial

Pengaruh masing-masing variabel diuji secara parsial melalui uji t pada taraf signifikansi 5%. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa pengawasan internal memberikan pengaruh positif

dan signifikan terhadap kualitas RKA, demikian pula akuntabilitas diperkirakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas RKA.

Tabel 5. Hasil Uji t

Hipotesis	Pengaruh	t-hitung	Sig.	Keputusan
H1	Pengawasan Internal → Kualitas RKA	[]	[]	[Diterima/Ditolak]
H2	Akuntabilitas → Kualitas RKA	[]	[]	[Diterima/Ditolak]

Berdasarkan hasil uji t, pengawasan internal memperoleh nilai t sebesar [] dengan tingkat signifikansi []. Karena nilai signifikansi [$< / \geq$] 0,05, H1 dinyatakan [diterima/ditolak]. Dengan hasil tersebut, pengawasan internal [berpengaruh/tidak berpengaruh] secara signifikan terhadap kualitas RKA.

Hasil uji t untuk akuntabilitas menunjukkan nilai t sebesar [] dan signifikansi sebesar []. Setelah dibandingkan dengan batas [$< / \geq$] 0,05, H2 [diterima/ditolak]. Oleh karena itu, akuntabilitas [berpengaruh/tidak berpengaruh] secara signifikan terhadap kualitas RKA.

4.1.6 Pengujian hipotesis secara simultan

Uji F digunakan untuk menilai apakah pengawasan internal dan akuntabilitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kualitas RKA. Sesuai rancangan penelitian, uji simultan tersebut menggunakan tingkat signifikansi 0,05 sebagai dasar pengambilan keputusan.

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	F-hitung	Sig.	Keputusan
X1 dan X2 → Y	[]	[]	[H3 Diterima/Ditolak]

Nilai F sebesar [] dengan signifikansi [] memberikan gambaran bahwa pengawasan internal dan akuntabilitas secara simultan [berpengaruh/tidak berpengaruh] terhadap kualitas RKA. Dengan mempertimbangkan nilai signifikansi [$< / \geq$] 0,05, keputusan terhadap H3 adalah [diterima/ditolak].

4.1.7 Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate
[]	[]	[]	[]

Hasil estimasi menghasilkan nilai R Square sebesar []. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengawasan internal dan akuntabilitas secara bersama-sama menjelaskan sebesar []% variasi kualitas RKA, sementara []% sisanya berkaitan dengan faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

4.2 Diskusi

4.2.1 Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kualitas RKA

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengawasan internal [pengaruh positif yang signifikan/tidak berpengaruh signifikan] terhadap kualitas RKA. Dengan demikian, temuan tersebut [mendukung/tidak mendukung] hipotesis pertama. Secara konseptual, pengawasan

internal berfungsi menjaga agar perencanaan dan penganggaran tetap mengikuti ketentuan, risiko dapat dikenali, kegiatan pengendalian terlaksana, informasi tersedia secara memadai, dan hasil pemantauan memperoleh tindak lanjut. Kelima unsur tersebut digunakan sebagai dasar operasionalisasi pengawasan internal dalam penelitian ini.

Apabila hasil pengujian membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas pengawasan internal dapat diikuti oleh peningkatan kualitas RKA. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu dalam proposal, termasuk Handayani dan Ridwan (2024) yang menemukan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja serta Permata et al. (2023) yang menunjukkan pengaruh pengawasan terhadap daya serap anggaran. Kendati demikian, kedua penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yang berbeda, sehingga penelitian ini memiliki kekhususan karena memusatkan perhatian pada kualitas RKA sebagai keluaran perencanaan dan penganggaran.

4.2.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas RKA

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa akuntabilitas [pengaruh positif dan signifikan/tidak berpengaruh signifikan] terhadap kualitas RKA. Temuan tersebut [mendukung/tidak mendukung] hipotesis kedua. Akuntabilitas dalam penelitian ini meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, program, serta kebijakan. Secara teoretis, semakin kuat pertanggungjawaban aparatur selama penyusunan rencana dan anggaran, semakin besar pula dorongan untuk memastikan program, kegiatan, indikator, dan alokasi anggaran memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan tersebut dapat ditempatkan dalam perbandingan dengan penelitian Idawati dan Eleonora (2024) yang menyatakan bahwa SPIP dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaannya terutama terletak pada variabel dependen yang digunakan. Penelitian terdahulu berfokus pada kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian ini menilai kualitas RKA. Perbedaan keluaran tersebut penting karena RKA dihasilkan pada fase perencanaan dan penganggaran, sementara laporan keuangan merupakan produk pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

4.2.3 Pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntabilitas terhadap Kualitas RKA Secara Simultan

Hasil uji F menunjukkan bahwa pengawasan internal dan akuntabilitas secara simultan [berpengaruh positif dan signifikan/tidak berpengaruh signifikan] terhadap kualitas RKA. Temuan ini [mendukung/tidak mendukung] hipotesis ketiga. Dari sisi konseptual, kualitas RKA tidak hanya ditentukan oleh keberadaan mekanisme pengawasan, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam mempertanggungjawabkan proses dan keputusan perencanaan serta penganggaran. Dengan demikian, pengawasan internal dan akuntabilitas dapat diposisikan sebagai dua mekanisme yang saling memperkuat dalam membentuk RKA yang berkualitas.

Temuan ini turut memperkuat research gap yang telah dirumuskan dalam proposal. Studi sebelumnya lebih banyak mengaitkan pengawasan internal dan akuntabilitas dengan kualitas laporan keuangan, akuntabilitas kinerja, tata kelola, maupun daya serap anggaran. Sebaliknya, kajian yang secara khusus menguji kedua variabel tersebut sebagai faktor yang memengaruhi kualitas RKA masih relatif terbatas. Apabila pengujian simultan menghasilkan pengaruh signifikan,

penelitian ini dapat memperluas bukti empiris mengenai faktor penentu kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran pada instansi pemerintah.

4.1.4 Implikasi Praktis dan Kebijakan

Hasil penelitian memiliki sejumlah konsekuensi praktis bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Jika pengawasan internal terbukti signifikan, penguatan fungsi tersebut perlu dimulai sejak penyusunan RKA dan tidak hanya dilakukan ketika anggaran telah dilaksanakan. Bentuk penguatan dapat berupa identifikasi risiko, reviu keselarasan program dengan dokumen perencanaan, penilaian kewajaran alokasi anggaran, serta pemantauan dan tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Apabila akuntabilitas terbukti signifikan, organisasi perlu menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas setiap program dan kegiatan secara lebih tegas, memperkuat dokumentasi yang menjadi dasar penyusunan anggaran, serta menjaga keterhubungan antara indikator kinerja dan sumber daya yang dialokasikan. Langkah tersebut sejalan dengan tujuan penelitian untuk memberikan manfaat praktis bagi penyempurnaan proses perencanaan dan penganggaran di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo.

4.1.5 Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi untuk Penelitian Mendatang

Keterbatasan penelitian terutama berkaitan dengan cakupan objek yang hanya berfokus pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Di samping itu, pengukuran variabel menggunakan kuesioner sehingga informasi yang diperoleh terutama merepresentasikan persepsi responden. Penelitian berikutnya dapat memperluas unit observasi ke beberapa kantor wilayah atau kementerian/lembaga sehingga daya generalisasi temuan menjadi lebih luas.

Studi berikutnya juga dapat menerapkan data longitudinal serta memadukan data persepsi dengan indikator objektif, antara lain hasil reviu RKA, jumlah revisi anggaran, temuan pemeriksaan, kesesuaian target dengan realisasi, dan capaian kinerja. Untuk membentuk model yang lebih komprehensif mengenai determinan kualitas RKA, variabel seperti kompetensi aparatur, manajemen risiko, kualitas informasi, komitmen organisasi, dan penerapan penganggaran berbasis kinerja dapat turut dipertimbangkan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengawasan internal dan akuntabilitas terhadap kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan internal [berpengaruh positif dan signifikan/tidak berpengaruh signifikan] terhadap kualitas RKA sehingga hipotesis pertama [diterima/ditolak]. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa [semakin baik pengawasan internal, semakin baik kualitas RKA/pengawasan internal belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas RKA]. Dalam penelitian ini, pengawasan internal mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal.

Akuntabilitas [berpengaruh positif dan signifikan/tidak berpengaruh signifikan] terhadap kualitas RKA sehingga hipotesis kedua [diterima/ditolak]. Hasil tersebut menunjukkan bahwa [semakin tinggi akuntabilitas aparatur dalam proses perencanaan dan penganggaran, semakin baik kualitas RKA/akuntabilitas belum memberikan menunjukkan pengaruh positif yang signifikan

terhadap kualitas RKA]. Selanjutnya, pengawasan internal bersama akuntabilitas secara simultan [berpengaruh signifikan/tidak berpengaruh signifikan] terhadap kualitas RKA sehingga hipotesis ketiga [diterima/ditolak]. Secara keseluruhan, temuan penelitian memberikan bukti empiris mengenai hubungan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dengan mutu proses perencanaan serta penganggaran pada organisasi pemerintah.

Implikasi praktis penelitian menegaskan bahwa peningkatan mutu RKA perlu diiringi penguatan pengawasan internal dan akuntabilitas pada seluruh tahapan perencanaan serta penganggaran. Pengawasan dapat difokuskan pada identifikasi risiko, penilaian kesesuaian program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan, ketepatan penetapan alokasi anggaran, serta pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pada sisi lain, akuntabilitas perlu diperkuat melalui penegasan pihak yang bertanggung jawab, penggunaan indikator kinerja yang terukur, serta pertanggungjawaban atas keputusan dan alokasi sumber daya. Langkah tersebut diharapkan mendukung terbentuknya RKA yang lebih akurat, terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil kinerja.

Penelitian ini dibatasi oleh objek yang hanya mencakup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, sehingga kehati-hatian diperlukan ketika hasilnya hendak digeneralisasikan pada organisasi pemerintah lain. Penggunaan kuesioner sebagai instrumen utama juga menyebabkan informasi penelitian sangat bergantung pada persepsi responden. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan beberapa kantor wilayah atau kementerian/lembaga, menggunakan rentang waktu pengamatan yang lebih panjang, serta menggabungkan data persepsi dengan data objektif seperti hasil revidi RKA, perubahan atau revisi anggaran, temuan pemeriksaan, dan capaian kinerja. Selain itu, variabel kompetensi aparatur, manajemen risiko, kualitas informasi, komitmen organisasi, dan penganggaran berbasis kinerja dapat ditambahkan untuk memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang menentukan kualitas RKA.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, G. (2010). *Manajemen Pemasaran: Analisis untuk Perancangan Strategi Pemasaran*. UPP STIM YKPN. /https://www.google.com/search?q=Adisaputro%2C+G.+%282010%29.+Manajemen+Pemasaran%3A+Analisis+untuk+Perancangan+Strategi+Pemasaran.+UPP+STIM+YKPN.&oeq=Adisaputro%2C+G.+%282010%29.+Manajemen+Pemasaran%3A+Analisis+untuk+Perancangan+Strategi+Pemasaran.+UPP+STIM+YKPN.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPAjIHCAIQIRiPATiBCTI5ODhqMGoxNagCCLACaFEFV7sUnM9poEE&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Adisaputro, G., & Anggarini, Y. (2017). *Anggaran Bisnis: Analisis, Perencanaan, dan Pengendalian Laba* (1st ed.). UPP STIM YKPN. / <https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=256941>
- Aprillia, Y., & Usman, F. (2023). Pengaruh Peran Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah. *Jurnalku*, 3(4), 408–425. / <https://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/600>
- Bandiyono. (2020). *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Pemoderasi*. / <https://ecojoin.org/index.php/EJA/article/view/699>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications. / <https://www.johnwreswell.com/>
- Ghofur, N. (2014). *Manajemen Publik Pada Pemerintahan*. Bumi Angkasa. /https://www.google.com/search?q=Ghofur%2C+N.+%282014%29.+Manajemen+Publik+Pada+Pemerintahan.+Bumi+Angkasa.&sca_esv=e8b56c3c652e1040&biw=1280&bih=585&sxsrf=ANbLn5JCKsuNtbHH0VD8j3A077406_CnQ%3A1780982814597&ei=HqQnaryRJN3V4-EPjO-84Qw&ved=0ahUKEwi8mI-AtvmUAxXd6jgGHYw3L8wQ4dUDCBA&uact=5&oeq=Ghofur%2C+N.+%282014%29.+Manajemen+Publik+Pada+Pemerintahan.+Bumi+Angkasa.&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcniAiREdob2Z1ciwgTi4gKDIwMTQpLiBNYW5hamVtZW4gUHVibGlrIFBhZGEgUGVtZXJpbmRhaGFuLiBCdW1pIEFuZ2thc2EuSL4Q

- UABYsghwAXgBkAEAmAHcAaAB3AGqAQMyLTG4AQPIAQD4AQH4AQKYAgGgAgSoAgrCAhA
QABgDGI8BGOoCGLQC2AEBwgIQEC4YAXiPARjqAhi0AtgBAZgDBPEFK7n24OcXNgO6BgQIARgK
kgcBMAHVrIHAlgHAMIHAzItMcgHA4AIAQ&scient=gws-wiz-serp
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro./ [https://scholar.google.co.id/scholar?q=Ghozali,+I.+\(2018\).+Aplikasi+Analisis+Multivariate+dengan+Program+IBM+SPSS.+Badan+Penerbit+Universitas+Diponegoro.&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar](https://scholar.google.co.id/scholar?q=Ghozali,+I.+(2018).+Aplikasi+Analisis+Multivariate+dengan+Program+IBM+SPSS.+Badan+Penerbit+Universitas+Diponegoro.&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar)
- Griffin, R. W. (2021). *Fundamentals of Management* (10th ed.). Cengage Learning. / [https://scholar.google.co.id/scholar?q=Griffin,+R.+W.+\(2021\).+Fundamentals+of+Management+\(10th+ed.\).+Cengage+Learning.&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar](https://scholar.google.co.id/scholar?q=Griffin,+R.+W.+(2021).+Fundamentals+of+Management+(10th+ed.).+Cengage+Learning.&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar)
- Handayani, D. S., & Ridwan. (2024). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(2), 1073–1082. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i2.4014> / <https://jurnal.itscience.org/index.php/jebma/article/view/4014>
- Idawati, W., & Eleonora, L. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan. *Equity: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 22(2), 153–172. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936> / <https://ejournal.upnvj.ac.id/equity/article/view/1367>
- Indonesia, R. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. / <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2008/60tahun2008pp.htm>
- Kharisma, I. P., Rahayu, S., & Yudi. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kota Jambi (Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 6(2), 126–135. <https://doi.org/10.22437/jaku.v6i2.13160> / <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/14278>
- Lemana, A. H., Handarini, D., & Pahala, I. (2024). Procurement, Reform, Accountability, and Internal Control: Effects on Budget Absorption. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 13(2). <https://doi.org/10.32493/jiaup.v13i2.49547> / https://www.researchgate.net/publication/395296243_Procurement_Reform_Accountability_and_Internal_Control_Effects_on_Budget_Absorption
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. / https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_vpt_read#v=onepage&q&f=false
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. / <https://books.google.co.id/books?id=f4ncEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Musfirah. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Pemerintah*. Pusaka Almaida. / https://www.google.com/search?q=Musfirah.+%282021%29.+Akuntabilitas+Pengelolaan+Keuangan+dan+Kinerja+Pemerintah.+Nama+Penerbit.&sca_esv=4fa1f44df72afb23&sxsrf=ANbLn7BUyiPjVlPmD6MqD9C7sScDGUGtw%3A1780984591988&ei=D6snaqiNPPuZseMPt4qNoA0&biw=1280&bih=585&ved=0ahUKEwjo0NLPvPmUAxX7TGwGHTdFA9QQ4dUDCBA&uact=5&oq=Musfirah.+%282021%29.+Akuntabilitas+Pengelolaan+Keuangan+dan+Kinerja+Pemerintah.+Nama+Penerbit.&gs_l=p=Egxdn3Mtd2l6LXNlcnAiW011c2ZpcmFoLiAoMjAyMSkuIEFrdW50YWJpbGl0YXMGUGVuZ2Vsb2xhYW4gS2V1YW5nYW4gZGFuIEtpbmVyamEgUGVtZXJpbmRhaC4gTmFtYSBQZW5lcmJpdC5IAFAAWABwAHgBkAEAmAEAoAEAgEAEuAEDyAEA-AEC-AEBmAIAoAIAmAMakgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&scient=gws-wiz-serp
- Nafarin, M. (2007). *Penganggaran Perusahaan* (3rd ed.). Salemba Empat. / <https://penerbitsalemba.com/buku/02-0117-penganggaran-perusahaan-edisi-3>
- Nafarin, M. (2015). *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat. / <https://penerbitsalemba.com/buku/02-0117-penganggaran-perusahaan-edisi-3>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited. / <https://letrunghieutvu.yolasite.com/resources/w-lawrence-neuman-social-research-methods-qualitative-and-quantitative-approaches-pearson-education-limited-2013.pdf>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (2010). / <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4db90a5eb9d9b/peraturan-pemerintah-nomor-90-tahun-2010/>

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014). / <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41515/perpres-no-29-tahun-2014>
- Permata S., N., Rahayu, S., & Yudi. (2023). Pengaruh Perencanaan, Transparansi, Akuntabilitas dan Pengawasan Terhadap Daya Serap Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 105–117. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.19119> / <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/19119>
- Sasongko, C., & Parulian, S. R. (2015). *Anggaran*. Salemba Empat. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=nxzGJP4AAAAJ&citation_for_view=nxzGJP4AAAAJ:9yKSN-GCB0IC
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. John Wiley & Sons. / [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ko6bCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA19&dq=Sekaran,+U.,+%26+Bougie,+R.+\(2016\).+Research+Methods+for+Business:+A+Skill-Building+Approach.+John+Wiley+%26+Sons.&ots=2D5MS5P_nQ&sig=2WNwXQqBPgcQZ0ORG0KSCs x4ktE&redir_esc=y#v=onepage&q=Sekaran%2C%20U.%2C%20%26%20Bougie%2C%20R.%20\(2016\).%20Research%20Methods%20for%20Business%3A%20A%20Skill-Building%20Approach.%20John%20Wiley%20%26%20Sons.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Ko6bCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA19&dq=Sekaran,+U.,+%26+Bougie,+R.+(2016).+Research+Methods+for+Business:+A+Skill-Building+Approach.+John+Wiley+%26+Sons.&ots=2D5MS5P_nQ&sig=2WNwXQqBPgcQZ0ORG0KSCs x4ktE&redir_esc=y#v=onepage&q=Sekaran%2C%20U.%2C%20%26%20Bougie%2C%20R.%20(2016).%20Research%20Methods%20for%20Business%3A%20A%20Skill-Building%20Approach.%20John%20Wiley%20%26%20Sons.&f=false)
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. / <https://scholar.google.com/citations?user=MGOs5rkAAAAJ&hl=id>
- Suryani, N. (2021). *Pengantar Manajemen*. Yayasan Kita Menulis. / <https://repository.umb.ac.id/56/1/Buku%20pengantar-manajemen-dan-bisnis.pdf>
- Susilo, A.A. (2021). Pengaruh Efektivitas Internal Control dan Penerapan Good Governance terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 12(2), 115–130. / https://www.abacademies.org/articles/the-influence-of-the-effectiveness-of-internal-control-and-implementation-of-the-good-government-governance-on-accounting-informat-12398.html?utm_source=chatgpt.com
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003). / <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>